BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan persampahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penyelenggaraan pelayanan publik.[1] Peningkatan timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serta meningkatkan beban pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan persampahan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya merupakan persoalan teknis lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia memiliki landasan hukum yang berjenjang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), memberikan dasar konstitusional melalui jaminan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut menjadi landasan bagi negara untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam menangani persoalan persampahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

[1] Fionita Syafitri, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 2024," *Jurnal Prima Manajemen* 1, no. 2 (2025).

Sampah hadir sebagai pengaturan di tingkat daerah yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada implementasi Perda tersebut, khususnya di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, untuk menilai sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dalam praktik serta bagaimana pelaksanaannya dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka, mulai dari pengurangan sampah pada sumbernya hingga penanganan dan pemrosesan akhir. Secara khusus, Pasal 3 dan Pasal 4 mengatur asas dan tujuan pengelolaan sampah, yaitu penyelenggaraan yang berlandaskan tanggung jawab dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah, menetapkan kebijakan pengelolaan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, Pasal 9 mewajibkan setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Pasal 10, yang mengatur peran rukun tetangga dan rukun warga dalam menyosialisasikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah. Adapun penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 24, yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Ketentuan mengenai tempat pemrosesan akhir secara khusus terdapat dalam Pasal 24, yang mengatur bahwa pemrosesan akhir dilakukan dengan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman melalui metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan TPA Heuleut Kabupaten Majalengka perlu dikaji berdasarkan ketentuan tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan daerah telah memenuhi prinsip pengelolaan sampah yang efektif, terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya, yang mencakup kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, komunikasi antarorganisasi, koordinasi kelembagaan, komitmen pelaksana, serta tingkat kepatuhan masyarakat.[2] Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu regulasi dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi sasarannya.

Namun demikian, Kondisi empiris pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sarana operasional, infrastruktur, dan pengolahan sampah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Heuleut, volume sampah yang masuk ke TPA tersebut mencapai sekitar 130 ton per hari, dengan kapasitas penanganan sekitar 130 ton per hari atau setara dengan 210–250 m^3 per hari. TPA Heuleut memiliki luas lahan sekitar 7,5 hektare, yang terdiri atas 2,7 hektare lahan lama dan 4,8 hektare lahan baru. Dalam menunjang kegiatan operasional, pengelolaan sampah didukung oleh 4 unit dump truck, 9 unit arm roll, 1 unit mini *pick-up*, dan 1 unit excavator, serta 10 petugas operasional yang bertugas dalam kegiatan pengelolaan sampah di TPA tersebut. Meskipun

[2] Muammar Qadafi, Mohd Tasar, and Adri Patria, "Dinamika Integrasi Wilayatul Hisbah Dan Satpol PP Di Bireuen Pasca Penerapan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 22903–22910.

didukung oleh sejumlah sarana dan tenaga operasional, pelaksanaan pengelolaan sampah masih menghadapi beberapa keterbatasan. Berdasarkan wawancara awal, kondisi jalan menuju TPA yang mengalami kerusakan menjadi salah satu kendala dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional. Selain itu, proses pemilahan sampah masih dilakukan secara manual oleh pemulung, sedangkan excavator digunakan untuk membantu pemindahan dan penataan timbunan sampah. Belum tersedianya proses pengolahan lanjutan yang memadai, seperti pengomposan sampah organik dan pengolahan sampah anorganik untuk didaur ulang, menunjukkan bahwa penanganan sampah di TPA Heuleut masih berfokus pada kegiatan pengangkutan, pemindahan, dan penataan timbunan. Oleh karena itu, kondisi operasional TPA Heuleut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah telah berjalan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yang terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

TPA Heuleut adalah tempat Pemrosesan Akhir yang melayani Kabupaten Majalengka memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai pusat pemrosesan akhir sampah, TPA Heuleut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pelayanan persampahan, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah persoalan, seperti tingginya volume sampah yang masuk ke TPA, keterbatasan fasilitas pengolahan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya operasional, serta belum maksimalnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif yang diamanatkan oleh peraturan daerah dengan realitas implementasinya di lapangan.

Apabila kondisi tersebut tidak segera dikaji dan diperbaiki, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin luas. Penumpukan sampah yang tidak tertangani

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

secara optimal dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, meningkatkan risiko penyakit, menurunkan kualitas lingkungan hidup, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik di bidang persampahan. Selain itu, kegagalan implementasi kebijakan juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs),* khususnya tujuan mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem daratan.[3] Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut telah dilaksanakan secara efektif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.[4] Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Penggunaan teori ini dinilai relevan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 di TPA Heuleut karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik, penelitian ini juga mengkaji implementasi pengelolaan sampah dari perspektif *Fiqh Siyasah*. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, pemerintah (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*maslahah*). Dalam konteks pengelolaan sampah, konsep *maslahah* digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[3] Ega Saputra et al., "Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Dalam Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 4 (2025): 218–232, https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.1375.

[4] Palty Zainal Sibarani, Mashuri H.Tahili, and Subhan Haris, "Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 6, no. 1 (2026).

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, konsep *dar'u al-mafasid* digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal. Adapun tanggung jawab *ulil amri* menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelayanan, serta pembinaan dan pengawasan. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, baik dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat, upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, maupun pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya dapat dinilai dari aspek administratif dan yuridis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, serta perlindungan terhadap lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai pengelolaan sampah lebih banyak berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah, strategi pengurangan sampah berbasis masyarakat, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah lain, maupun pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dari aspek teknis dan lingkungan. Penelitian yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 secara khusus masih sangat terbatas, mengingat peraturan daerah tersebut merupakan regulasi yang relatif baru. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan publik dengan perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya mengenai prinsip kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan pelestarian lingkungan, juga masih jarang dilakukan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian *(research gap)* yang perlu diisi melalui kajian ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengombinasikan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III dan perspektif *Fiqh Siyasah*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023, baik dari aspek hukum administrasi publik maupun dari perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Heuleut telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam *Fiqh Siyasah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka)" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan *Fiqh Siyasah*, tetapi juga menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah menuju sistem pengelolaan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. Belum diketahui secara komprehensif sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam peraturan daerah.
b. Masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Heuleut belum sepenuhnya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana diharapkan.
c. Terdapat berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi implementasi kebijakan, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, seperti aspek sumber daya, sarana dan prasarana, komunikasi, koordinasi antarinstansi, struktur birokrasi, serta partisipasi masyarakat.
d. Belum diketahui kesesuaian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, khususnya terkait kemaslahatan *(maslahah),* tanggung jawab pemerintah *(ulil amri),* dan menjaga kelestarian lingkungan.
e. Belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Heuleut dengan perspektif *Fiqh Siyasah* sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Penelitian difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

b. Analisis implementasi kebijakan difokuskan pada pelaksanaan peraturan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
c. Penelitian hanya mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.
d. Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan *(maslahah),* tanggung jawab pemerintah *(ulil amri),* dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan?
b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka?
c. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya dalam prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan menjaga kelestarian lingkungan?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.
c. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya dalam prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan menjaga kelestarian lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah melalui analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward III serta perspektif *Fiqh Siyasah* yang menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan pelestarian lingkungan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah maupun penelitian mengenai kebijakan publik yang dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola TPA Heuleut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Martono, Muharawati, Andi Bau Mallarangeng, dan Sulaeman Sagoni (2023) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.[5]

[5] Martono et al., "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah," *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 135–44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah pesisir Sungai Kecamatan Sabbangparu serta mengetahui peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan drainase. Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan berbagai upaya melalui program Bosara (Bola Sampah Sehat dan Sejahtera) dan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat pemerintah daerah dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 di kawasan pesisir sungai, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka serta menambahkan analisis berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sya'bani Arlan (2024) berjudul Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tapin (Studi Kasus di Kelurahan Bitahan),[6] bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta upaya mengatasi

[6] Agus Sya'bani Arlan, "Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Di Kelurahan Bitahan)," *Jurnal Ilmiah Niagara* 16, no. 1 (2024): 61–76.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Bitahan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Faktor pendukung implementasi adalah adanya tujuan kebijakan dan koordinasi antarinstansi, sedangkan faktor penghambat meliputi tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 di TPA Heuleut dengan menambahkan analisis berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Rahmansyah, Arafat, dan Sudirman Baso (2024) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka.[7] Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap para informan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena frekuensi pengangkutan sampah masih terbatas, partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah masih rendah, belum

[7] Ardi Rahmansyah, Arafat, and Sudirman Baso, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kolaka," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 729–742, https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.547.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

adanya petugas khusus yang menangani pengelolaan sampah, serta keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, regulasi yang dianalisis, serta penelitian ini menambahkan tinjauan implementasi kebijakan berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah* yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Arpandi dan Siti Aminah (2023) berjudul Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah di TPA Batu Merah Kabupaten Balangan.[8] Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Batu Merah belum efektif karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan alat berat, kapasitas TPA yang mulai penuh, belum optimalnya bank sampah, serta rendahnya dukungan anggaran dan kesadaran masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada pengukuran efektivitas pengelolaan sampah di TPA, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 sebagai kebijakan publik beserta faktor-faktor yang memengaruhinya dan ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka R. I., Anita D. M., dan Khoiron (2023) dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia mengkaji sistem

[8] Arpandi and Siti Aminah, "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4750–4755. (edit judul, jangan gunakan huruf kapital secara keseluruhan)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pengelolaan sampah di TPA Lempeni Kabupaten Lumajang.[9] Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA Lempeni serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan metode sanitary landfill. Penelitian menggunakan metode deskriptif observasional dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengujian kualitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *sanitary landfill* belum optimal karena keterbatasan tanah penutup, alat berat, pengelolaan air lindi yang belum memenuhi baku mutu, serta pengendalian gas metana yang masih kurang efektif sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama meneliti pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan lingkungan dalam sistem pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah dari aspek hukum administrasi dan dianalisis menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah atau efektivitas pengelolaan sampah di berbagai daerah serta aspek teknis pengelolaan TPA. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dengan studi kasus di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, sekaligus menganalisis implementasinya berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya mengenai prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan *(novelty)* dan diharapkan dapat

[9] Rizka Rahmannita Islami, Anita Dewi Moelyaningrum, and Khoiron Khoiron, "Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 2 (2023): 179–188, https://doi.org/10.14710/jkli.22.2.179-188.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, hukum administrasi negara, serta *Fiqh Siyasah* dalam bidang pengelolaan sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pelayanan publik, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Kabupaten Majalengka, landasan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan tempat pemrosesan akhir, pembinaan, pengawasan, serta partisipasi para pemangku kepentingan.

Keberadaan peraturan daerah tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa terdapat kesenjangan yang perlu dianalisis antara tujuan normatif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 dengan kondisi empiris pengelolaan sampah di TPA Heuleut. Dalam skripsi ini ditemukan adanya persoalan berupa tingginya volume sampah yang masuk ke TPA, keterbatasan fasilitas pengolahan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, keterbatasan sumber daya operasional, serta belum maksimalnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian terhadap implementasi peraturan daerah tersebut.

Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023, penelitian ini menggunakan teori

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan dalam peraturan daerah diterjemahkan dan dilaksanakan dalam praktik pengelolaan sampah di TPA Heuleut.

Pertama, komunikasi digunakan untuk menganalisis bagaimana informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 disampaikan kepada pelaksana kebijakan, pengelola TPA, dan masyarakat, termasuk kejelasan serta konsistensi informasi mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Kedua, sumber daya digunakan untuk melihat ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Ketiga, disposisi digunakan untuk melihat sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi digunakan untuk melihat pembagian tugas, mekanisme kerja, koordinasi, dan prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Keempat aspek tersebut selanjutnya diarahkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, dari keempat aspek tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan batasan penelitian yang secara khusus memusatkan analisis implementasi pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil analisis implementasi kebijakan tersebut dikaji menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah*. Perspektif ini digunakan untuk melihat apakah penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Dalam penelitian ini, prinsip yang menjadi fokus adalah kemaslahatan *(maslahah),* tanggung jawab pemerintah *(ulil amri),* dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip *jalb al-mashalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan) menjadi dasar untuk menilai kebijakan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dari hubungan antara permasalahan pengelolaan sampah di TPA Heuleut, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar hukum, teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai alat analisis empiris, dan *Fiqh Siyasah* sebagai perspektif normatif Islam. Analisis tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perda, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, dan pelestarian lingkungan.

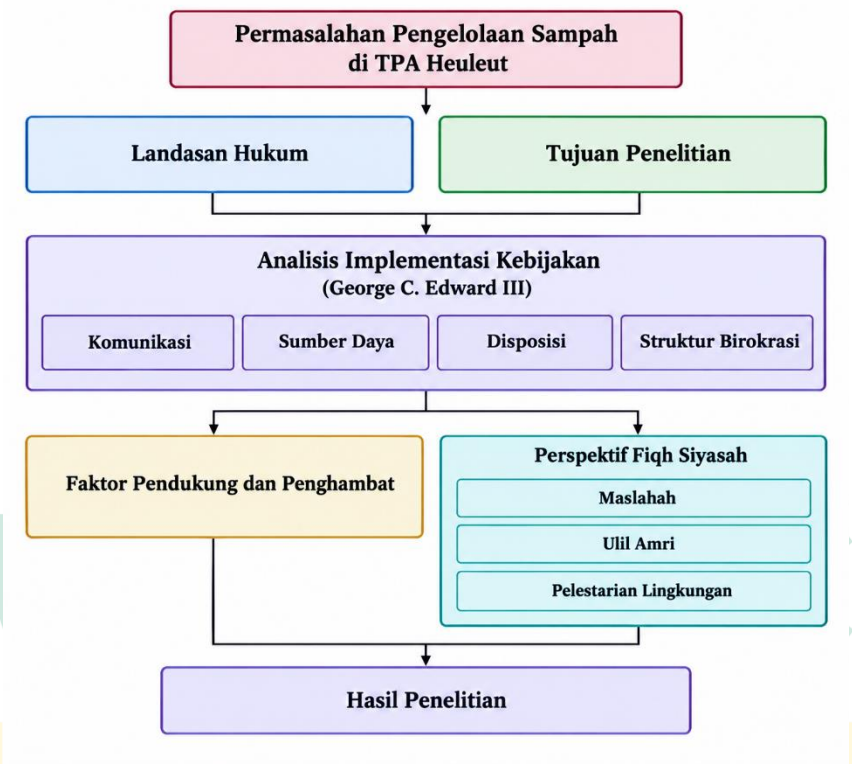

Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

adalah ilmu atau kajian yang mempelajari cara-cara, prinsip-prinsip, dan prosedur sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna memecahkan suatu masalah atau memperoleh pengetahuan baru.[10]

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. **Metode Penelitian**

   Metode penelitian adalah prosedur, teknik, atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data guna menemukan jawaban atas suatu masalah atau menguji sebuah hipotesis.[11]

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kondisi dan pelaksanaan pengelolaan sampah secara langsung di lapangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan temuan di lapangan.

2. **Pendekatan Penelitian**

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[10] Zulfikah Nur, Umar Sulaiman, and Ulfiani Rahman, "Metodologi Penelitian : Analisis Konseptual Untuk Memahami Hakikat , Tujuan , Prosedur, Dan Klasifikasi Penelitian," *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology* 4, no. 1 (2024): 34–45, https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/ijset/article/view/1395.

[11] Nur Hasna Laili et al., "Pendekatan Penelitian (Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)," *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 1–14.

Pendekatan penelitian adalah rencana, strategi umum, atau cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji suatu masalah, mulai dari perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.[12] Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penggolongan atau klasifikasi suatu kegiatan penyelidikan ilmiah berdasarkan pendekatan, tujuan, sifat, atau tingkat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah.[13] Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, yaitu TPA Heuleut Kabupaten Majalengka. Adapun metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu, yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dalam konteks nyata.

4. Sumber Data Penelitian

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[12] Yurmaini Yurmaini et al., "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Hibrul Ulama* 6, no. 1 (2024): 83–90, https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.762.

[13] Ramli Et Al., "Penelitian Multidimensi : Analisis Beragam Jenis Dan Teknik," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024): 3846–3860.

Sumber Data Penelitian adalah subjek, tempat, atau benda (seperti manusia, dokumen, atau hasil observasi) dari mana data atau informasi ilmiah diperoleh untuk keperluan penelitian.[14] Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya (tangan pertama) tanpa melalui perantara, guna menjawab masalah atau tujuan penelitian secara spesifik. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara dan observasi di lapangan.[15] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah atau pejabat yang membidangi pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
2) Kepala atau Pengelola TPA Heuleut Kabupaten Majalengka.
3) Petugas operasional TPA Heuleut serta masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah apabila diperlukan sebagai informan pendukung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui pihak kedua, perantara, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak mengumpulkan data ini secara langsung dari

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[14] Fadila Ramadona Wijaya et al., "Sumber Data, Subjek Penelitian, Dan Isu Terkait," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 66–72.

[15] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

lapangan atau objek penelitian asli, melainkan memanfaatkan kembali data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain.[16]

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang membahas implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, hukum administrasi negara, dan *Fiqh Siyasah*.
3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dokumen resmi pemerintah, laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, data statistik, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[16] Yurmaini et al., "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif."

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *field research,* yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaktif berupa tanya jawab antara dua pihak atau lebih (pewawancara dan narasumber) dengan tujuan utama untuk mengumpulkan data, informasi, keterangan, atau pendapat tertentu.[17]

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Heuleut. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Kepala atau Pengelola TPA Heuleut, petugas operasional TPA, serta pihak lain yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan atau peninjauan secara cermat, langsung, dan sistematis terhadap suatu objek, tempat, atau fenomena tertentu untuk mengumpulkan data atau informasi yang faktual.[18]

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi TPA Heuleut, proses pengelolaan sampah, sarana dan prasarana yang tersedia, serta pelaksanaan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[17] Amitha Shofiani Devi et al., "Mewawancarai Kandidat : Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas," *MASMAN : Master Manajemen* 2, no. 2 (2024).

[18] Putri Adinda Pratiwi et al., "Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL," *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 133–149, https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.877.

kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi atau bukti dalam bentuk tulisan, gambar, video, atau rekaman lain untuk memberikan keterangan yang sah.[19]

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data volume sampah, struktur organisasi, foto kegiatan, arsip, dan dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh data yang relevan.

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data serta menemukan pola-pola yang berkaitan dengan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[19] Katrinsia Sintia Dua Iku et al., "Dokumentasi Dan Kearsipan Sebagai Bentuk Komunikasi Organisasi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sikka INFO," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 1 (2024): 124–134, http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh.

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)***

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta tinjauannya berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka serta arah dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori implementasi kebijakan publik, khususnya teori implementasi kebijakan George C. Edward III, konsep pengelolaan sampah, konsep implementasi peraturan daerah, tinjauan mengenai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta teori-teori dalam *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan pelestarian lingkungan. Selain itu, bab ini juga memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia dan Kabupaten Majalengka.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah singkat TPA Heuleut, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mekanisme pengelolaan sampah, serta kondisi faktual yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu: (1) implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Heuleut Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan; (2) faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut; dan (3) analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya ditinjau dari prinsip kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*), dan menjaga kelestarian lingkungan. Seluruh hasil

penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III serta dikaitkan dengan konsep-konsep *Fiqh Siyasah* yang relevan.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, saran diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, pengelola TPA Heuleut, masyarakat, serta peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan pengembangan penelitian pada bidang yang sama.

Daftar Pustaka

Bagian ini memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi pemerintah, maupun sumber ilmiah lainnya yang disusun sesuai dengan pedoman sitasi yang berlaku di perguruan tinggi.

Lampiran

Bagian lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung penelitian, antara lain surat izin penelitian, pedoman wawancara, daftar pertanyaan wawancara, transkrip hasil wawancara, dokumentasi kegiatan penelitian, data pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dan TPA Heuleut, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON